

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara dengan banyak pulau dan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak. Artinya, Indonesia terdiri dari berbagai banyak daerah. Maka dari itu, dibutuhkan suatu pembangunan ekonomi di setiap daerah perlu dilakukan secara merata agar tidak terjadinya kesenjangan antar daerah dan mengurangi perbedaan kemampuan antar daerah. Pembangunan daerah menjadi bagian integral dari pembangunan nasional, yang berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengendalian sumber daya nasional.

Pembangunan dijalankan tidak hanya di wilayah nasional, tetapi juga di wilayah lebih kecil seperti daerah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Dikarenakan pembangunan di wilayah yang lebih kecil dapat memberikan hasil yang mendukung pembangunan di wilayah yang lebih besar. Kemajuan suatu daerah terutama dalam hal ekonomi dipengaruhi dengan adanya pembangunan daerah. Tercapai atau tidaknya pembangunan ekonomi daerah tidak terlepas dari perbaikan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi mendeskripsikan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang yang menggambarkan kondisi perekonomian di daerah tersebut (Boediono, 2022). Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dapat dikatakan semakin sejahtera masyarakatnya yang ada di daerah tersebut, karena tingkat kesejahteraan masyarakat dideskripsikan dengan tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut (R. R. A. Hasibuan et al., 2022).

Pertumbuhan ekonomi nasional dilihat dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) yang merupakan total nilai atau harga pasar dari seluruh barang dan jasa akhir yang ditentukan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu, dan untuk wilayah/regional dalam suatu periode tertentu dapat dilihat dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan (BPS, 2019a). PDRB mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam. Peningkatan produksi terhadap barang dan jasa pada kegiatan sosial ekonomi erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan hasil produksi dan pendapatan dapat meningkatkan tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi (Yuniarti et al., 2020).

Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu daerah otonom yang memiliki batas wilayah tertentu dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yakni pada tahun 2019 penduduk provinsi Jawa Barat berjumlah 49.316.712 jiwa (Statistik, 2019). Provinsi Jawa Barat juga sedang mengalami suatu proses pembangunan ekonomi. Perekonomian masyarakat di Provinsi Jawa Barat meningkat dengan adanya pembangunan daerah yang berlangsung secara menyeluruh dan berkelanjutan. Keberadaan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dengan sumber daya yang dimilikinya sangat mempengaruhi atas pencapaian dari hasil pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pelaksana pembangunan di daerah Jawa Barat juga dihadapkan pada permasalahan tentang bagaimana memacu pertumbuhan *output* daerahnya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

**Tabel 1.1**

**Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019**

(Dalam Persen)

<b>Tahun</b>	<b>Laju Pertumbuhan</b>
2015	5,05
2016	5,66
2017	5,35
2018	5,64
2019	5,02

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, Provinsi Jawa Barat memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang cukup fluktuatif dari tahun 2015-2019. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2016 tumbuh 5,66% meningkat signifikan dibanding tahun 2015 yang tumbuh 5,05%. Sepanjang tahun 2016, pergerakan kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Barat relatif cukup stabil dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2017 tumbuh sebesar 5,35% melambat dibandingkan tahun 2016 yang tumbuh 5,66%. Meskipun melambat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih tetap lebih tinggi dibandingkan perekonomian nasional yang tumbuh 5,07%.

Ekonomi Jawa Barat tahun 2018 tumbuh 5,64% meningkat dibanding tahun 2017 sebesar 5,35%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Real Estate sebesar 9,64%. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh

Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRRT sebesar 16,38%. Ekonomi Jawa Barat tahun 2019 tumbuh 5,02% melambat dibanding tahun 2018 sebesar 5,66%.

Berdasarkan paparan di atas, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015-2019 menunjukkan tingkat stabilitas yang tinggi. Bukan berarti Provinsi Jawa Barat bebas dari masalah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti upah minimum provinsi, investasi, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya harus saling berkoordinasi untuk terus optimistis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dipengaruhi oleh upah minimum provinsi, investasi, dan tingkat partisipasi angkatan kerja.

Setiap tahun jumlah penduduk terus bertambah, maka setiap tahunnya juga kebutuhan konsumsi penduduk sehari-hari juga meningkat. Tambunan (2014) menjelaskan bahwa di setiap tahunnya dibutuhkan pendapatan dan menurut Tarigan (2012) pendapatan bagi pekerja, yaitu upah dan gaji. Dalam studi Sholeh (2012) mengungkapkan berdasarkan teori permintaan dan penawaran tenaga kerja pada pasar kompetitif, salah satu faktor yang menentukan tingkat permintaan dan penawaran tenaga kerja adalah upah. Dalam penerapannya, untuk menentukan tingkat upah diperlukannya campur tangan pemerintah melalui kebijakan upah minimum yang berlaku di pasar. Pemerintah berusaha menjadi penengah diantara pihak pekerja dan perusahaan.

Berdasarkan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang baru UU No. 13/2003, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi dasar dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Dengan adanya kebijakan UMP tanpa mengabaikan kepentingan perusahaan dan perekonomian pada umumnya, upah pekerja diupayakan terjamin oleh pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup pekerja. Penetapan kebijakan upah minimum demi melindungi dan meningkatkan pendapatan pekerja yang masih berpenghasilan di bawah upah minimum merupakan tujuan dari pemerintah.

Dalam penetapan upah minimum, pemerintah menetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak, indeks harga konsumen, kemampuan untuk tumbuh dan menopang perusahaan, tingkat upah minimum antar daerah, kondisi pasar tenaga kerja, dan pendapatan per kapita daerah. Berdasarkan itu semua, pemerintah akan meninjau dan menetapkan berapa jumlah upah minimum di setiap daerah, begitu juga ketika pemerintah akan menaikkan jumlah upah minimum di suatu daerah. Karena, ketika pemerintah

mengabaikan ketentuan di atas mengakibatkan ketidakseimbangan ekonomi atau terganggu dan terhambatnya roda perekonomian di daerah tersebut, itu terjadi diakibatkan oleh tingkat produksi, konsumsi, dan distribusi yang dipengaruhi kenaikan upah minimum yang tidak tepat (Sulistiawati, 2012).

Pada kenyataannya, upah minimum adalah unsur penting dari pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Upah minimum memiliki peran penting untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran para pekerja. Oleh karena itu, unsur upah minimum sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi.

Upah minimum Provinsi Jawa Barat meningkat di setiap tahunnya yang dimana upah minimum ditetapkan oleh pemerintah sebagai perhatian yang penuh pada upah dalam bentuk perlindungan. Berdasarkan sumber BPS Provinsi Jawa Barat, diketahui bahwa upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 memiliki rata-rata kenaikan terbesar berada di Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Purwakarta. Sementara upah minimum terendah berada di Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar.

Selain upah minimum, menurut Todaro (2000) investasi berperan penting dalam mendorong pembangunan daerah dan merupakan faktor yang memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemampuan daerah dalam menetapkan kebijakan yang relevan dengan investasi dan dunia usaha serta meningkatkan kualitas pelayanan untuk masyarakat akan menjadi keberhasilan daerah dalam meningkatkan daya tariknya terhadap investasi. Berkembangnya kondisi investasi yang kompetitif dan sehat diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi timbal balik dalam pembangunan daerah yang menguntungkan. Dengan adanya investasi dalam akumulasi modal berdampak positif, hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Menurut Sukirno (2004) mengatakan bahwa investasi dapat mendorong banyak orang dalam menaikkan kesempatan kerja serta kegiatan ekonomi, sehingga dapat menaikkan pendapatan nasional atau daerah dan juga dapat menaikkan taraf kemakmuran.

Investasi memiliki kaitan yang erat terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan tumbuhnya investasi, maka kapasitas produksi akan meningkat, sehingga yang diharapkan dapat menciptakan nilai tambah *output* dan membuat pertumbuhan ekonomi meningkat (Arsyad, 2010). Peningkatan kapasitas produksi diperoleh melalui investasi swasta yang

disebut Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan investas asing yang disebut Penanaman Modal Asing (PMA), untuk pengeluaran barang modal dan alat produksi akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang guna mengganti dan menambah barang modal dalam perekonomian (Arfah, 2021).

Berdasarkan sumber BPS Provinsi Jawa Barat, realisasi investasi di Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu lima tahun pada tahun 2015 sampai 2019 fluktuatif. Realisasi investasi di Provinsi Jawa Barat sepanjang tahun 2019 tercatat sebesar Rp 137,5 triliun. Kesiapan infrastruktur dan kemudahan perizinan menjadi salah satu faktor penentu raihan tersebut. Salah satu kelebihan Jawa Barat adalah ada pada *high tech* manufaktur, salah satu ciri negara maju adalah negara yang berteknologi tinggi. Hal ini mendorong terjadinya sebuah percepatan di Jawa Barat dan menjadi fokus penting di Jawa Barat.

Selain investasi sebagai modal dalam pembangunan ekonomi daerah, sumber daya manusia juga merupakan salah satu modal yang penting. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat karena rasa memiliki terhadap daerahnya lebih besar, maka pembangunan daerah akan semakin cepat. Menurut Prawira et al., (2017) tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dapat dikatakan menjadi salah satu komponen yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. TPAK adalah angkatan kerja yang aktif secara ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dihasilkan oleh meningkatnya siklus kegiatan ekonomi di masyarakat.

Menurut Syafitri & Ariusni (2019) angkatan kerja menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi apabila diimbangi dengan kesempatan kerja yang luas. Di saat angkatan kerja yang banyak dan kesempatan kerja yang melimpah dan seimbang, maka produksi meningkat yang memiliki dampak terhadap tumbuhnya pertumbuhan ekonomi. TPAK digunakan sebagai alat ukur perkembangan angkatan kerja dan menunjukkan partisipasi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja standar nasional Indonesia. Selain itu, TPAK merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi tingkat *output* suatu kegiatan ekonomi. Semakin banyaknya masyarakat yang produktif, maka output yang dihasilkan akan meningkat juga mempengaruhi PDRB. Demikian juga untuk pendapatan per kapita, ketika TPAK meningkat di suatu daerah, berarti pendapatan per kapita dan tingkat konsumsi juga meningkat yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

TPAK di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu selama lima tahun sangat fluktuatif. Berdasarkan sumber BPS Provinsi Jawa Barat, diketahui

bahwa TPAK di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, TPAK terbesar berada di Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Banjar. Sementara TPAK terendah berada di Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kota Sukabumi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut apakah variabel Upah Minimum Provinsi (UMP), investasi, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mempengaruhi variabel pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat tahun 2015-2019. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat Tahun 2015-2019”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh upah minimum provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat tahun 2015-2019?
2. Apakah terdapat pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat tahun 2015-2019?
3. Apakah terdapat pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat tahun 2015-2019?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh upah minimum provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat tahun 2015-2019.
2. Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat tahun 2015-2019.
3. Pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat tahun 2015-2019.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian yang dipaparkan di atas, maka manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan referensi baru dalam penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan dalam menghadapi permasalahan yang relevan dengan penelitian ini. Serta menjadi referensi bagi para akademisi untuk melanjutkan penelitian berikutnya.